



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, diperlukan subsidi pupuk, yang sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi dan menentukan harga eceran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk An Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan atau bagian hewan dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok dan/atau petani di sektor pertanian.
8. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari Dinas.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen.
10. Harga Eceran Tertinggi adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dengan luasan tertentu.
13. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
14. Pelaksana Subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugasi sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An organik dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi social, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana pertanian.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk atau pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
21. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun dan Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas, serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015.

- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah untuk Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan, Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Peternakan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V serta Kebutuhan Pupuk Bersubsidi per bulan yang tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan RDKK yang disusun oleh Kelompok Tani, dan disetujui oleh Penyuluh dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 5

Untuk menjamin terpenuhinya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Kekurangan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah kecamatan yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten, wajib ditindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen.

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani.
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani, petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten Kebumen.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea : Rp1.800,00/kg (seribu delapan ratus rupiah per kilogram);
 - b. Pupuk Zwavelsur Amoniak (ZA) : Rp1.400,00/kg (seribu empat ratus rupiah per kilogram);
 - c. Pupuk Super Phospat-36 (SP-36) : Rp2.000,00/kg (dua ribu rupiah per kilogram);
 - d. Pupuk Nitrogen Phospat Kalium (NPK) : Rp2.300,00/kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram); dan
 - e. Pupuk Organik : Rp500,00/kg (lima ratus rupiah per kilogram).
- (3) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea : 50 Kg (lima puluh kilogram);
 - b. Pupuk Zwavelsur Amoniak (ZA) : 50 Kg (lima puluh kilogram);
 - c. Pupuk Super Phospat-36 (SP-36) : 50 Kg (lima puluh kilogram);
 - d. Pupuk Nitrogen Phospat Kalium (NPK) : 50 Kg (lima puluh kilogram); dan
 - e. Pupuk Organik : 40 Kg (empat puluh kilogram).

Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku, serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani.

Pasal 14

- (1) KP3 Kabupaten Kebumen melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 15

- (1) KP3 Kabupaten Kebumen wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN PUPUK DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015

No	Kecamatan	JENIS PUPUK				
		Urea (Ton)	SP-36 (Ton)	ZA (Ton)	N P K (Ton)	Organik (Ton)
1.	Ayah	500,50	129,00	40,00	305,50	163,00
2.	Buayan	684,00	191,00	104,50	256,00	177,00
3.	Puring	1.917,00	523,00	499,50	973,50	733,00
4.	Petanahan	1.464,00	635,00	388,50	1.201,50	694,00
5.	Klirong	825,00	119,00	173,50	351,50	251,00
6.	Buluspesantren	1.834,00	458,00	428,00	963,00	600,00
7.	Ambal	1.835,50	460,50	435,00	967,00	456,00
8.	Mirit	1.750,00	317,00	484,00	932,50	572,00
9.	Bonorowo	687,00	131,50	236,00	288,50	198,00
10.	Prembun	668,00	190,00	258,50	297,00	251,00
11.	Padureso	340,00	76,00	50,00	132,00	135,00
12.	Kutowinangun	899,00	205,00	149,50	280,00	251,00
13.	Alian	894,00	238,00	157,00	401,00	302,00
14.	Poncowarno	651,00	105,50	75,00	157,00	118,00
15.	Kebumen	1.099,00	382,50	138,50	542,00	330,00
16.	Pejagoan	447,50	65,50	81,00	137,50	142,00
17.	Sruweng	733,50	220,50	141,50	375,00	300,00
18.	Adimulyo	1.709,00	293,50	63,00	433,50	295,00
19.	Kuwarasan	1.033,00	220,00	158,00	397,50	192,00
20.	Rowokele	934,50	237,00	184,50	438,50	256,00
21.	Sempor	758,00	163,00	100,00	360,00	275,00
22.	Gombong	884,00	233,50	302,00	500,50	331,00
23.	Karanganyar	782,00	197,50	166,50	380,00	255,00
24.	Karanggayam	1.103,00	153,00	88,00	259,50	223,00
25.	Sadang	430,50	73,00	52,00	165,00	150,00
26.	Karangsambung	837,00	282,50	96,00	205,00	150,00
	JUMLAH	25.700,00	6.300,00	5.050,00	11.700,00	7.800,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN PUPUK DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015

No	Kecamatan	JENIS PUPUK				
		Urea (Ton)	SP-36 (Ton)	ZA (Ton)	N P K (Ton)	Organik (Ton)
1.	Ayah	375,00	101,00	28,00	238,00	129,00
2.	Buayan	513,00	149,00	73,00	200,00	140,00
3.	Puring	1.437,75	408,00	350,00	759,00	579,00
4.	Petanahan	1.098,00	495,00	272,00	937,00	548,00
5.	Klirong	618,75	93,00	121,00	274,00	198,00
6.	Buluspesantren	1.375,50	357,00	300,00	751,00	474,00
7.	Ambal	1.377,00	359,00	304,50	754,00	360,00
8.	Mirit	1.312,50	247,00	339,00	727,50	452,00
9.	Bonorowo	515,25	103,00	165,00	225,00	156,50
10.	Prembun	501,00	148,00	181,00	232,00	198,50
11.	Padureso	255,00	59,00	35,00	103,00	107,00
12.	Kutowinangun	674,25	160,00	105,00	218,50	198,00
13.	Alian	670,50	186,00	110,00	313,00	239,00
14.	Poncowarno	488,00	82,00	52,50	122,50	93,00
15.	Kebumen	824,25	298,00	97,00	423,00	261,00
16.	Pejagoan	336,00	51,00	57,00	107,00	112,00
17.	Sruweng	550,00	172,00	99,00	293,00	237,00
18.	Adimulyo	1.281,75	229,00	44,00	338,00	233,00
19.	Kuwarasan	774,75	172,00	111,00	310,00	152,00
20.	Rowokele	701,00	185,00	129,00	342,00	202,00
21.	Sempor	568,50	127,00	70,00	281,00	217,00
22.	Gombong	663,00	182,00	211,00	390,50	261,50
23.	Karanganyar	586,50	154,00	116,00	296,50	201,50
24.	Karanggayam	827,00	119,00	62,00	202,50	176,00
25.	Sadang	323,00	58,00	36,00	129,00	118,50
26.	Karangsambung	627,75	220,00	67,00	159,00	118,50
	JUMLAH	19.275,00	4.914,00	3.535,00	9.126,00	6.162,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN PUPUK DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015

No	Kecamatan	JENIS PUPUK				
		Urea (Ton)	SP-36 (Ton)	ZA (Ton)	N P K (Ton)	Organik (Ton)
1.	Ayah	177,50	50,00	51,00	94,00	56,50
2.	Buayan	189,50	50,00	51,00	94,00	56,50
3.	Puring	252,50	69,50	58,00	140,00	94,00
4.	Petanahan	376,00	69,50	52,00	140,00	94,00
5.	Klirong	393,00	69,50	71,00	140,00	94,00
6.	Buluspesantren	168,00	69,50	52,00	140,00	105,00
7.	Ambal	193,50	69,50	65,00	140,00	105,00
8.	Mirit	267,50	69,50	71,00	140,00	108,00
9.	Bonorowo	111,50	40,00	39,00	70,25	45,00
10.	Prembun	188,50	35,00	65,00	70,25	40,00
11.	Padureso	124,00	40,00	52,00	70,25	45,00
12.	Kutowinangun	132,00	40,00	58,50	70,25	45,00
13.	Alian	148,00	35,00	52,00	70,25	40,00
14.	Poncowarno	159,00	35,00	52,00	70,25	40,00
15.	Kebumen	115,50	35,00	32,50	70,25	40,00
16.	Pejagoan	245,00	40,00	52,00	70,25	43,50
17.	Sruweng	325,50	35,00	52,00	70,25	40,00
18.	Adimulyo	217,00	50,00	32,50	94,00	57,00
19.	Kuwarasan	165,00	35,00	32,50	70,25	39,50
20.	Rowokele	246,50	35,00	71,00	70,25	39,50
21.	Sempor	280,00	35,00	58,50	70,25	39,50
22.	Gombong	104,00	35,00	32,50	70,25	39,50
23.	Karanganyar	121,00	35,00	65,00	70,25	39,50
24.	Karanggayam	183,50	35,00	117,00	70,25	39,50
25.	Sadang	108,50	35,00	52,00	70,25	39,50
26.	Karangsambung	148,00	50,00	78,00	94,00	57,00
	JUMLAH	5.140,00	1.197,00	1.465,00	2.340,00	1.482,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN PUPUK DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015

No	Kecamatan	JENIS PUPUK				
		Urea (Ton)	SP-36 (Ton)	ZA (Ton)	N P K (Ton)	Organik (Ton)
1.	Ayah	15,60	2,70	0,90	7,05	4,80
2.	Buayan	15,60	2,70	0,90	7,05	4,80
3.	Puring	31,20	8,00	0,90	10,50	4,80
4.	Petanahan	31,20	8,00	1,55	10,50	6,00
5.	Klirong	31,20	8,00	1,55	10,50	6,00
6.	Buluspesantren	31,20	5,40	1,80	10,50	9,50
7.	Ambal	31,20	5,40	1,80	10,50	9,50
8.	Mirit	31,20	5,40	1,80	10,50	9,50
9.	Bonorowo	15,60	5,40	0,90	5,30	4,80
10.	Prembun	15,60	5,40	0,90	5,30	3,60
11.	Padureso	26,00	5,40	0,60	5,30	2,40
12.	Kutowinangun	15,60	5,40	0,60	5,30	3,60
13.	Alian	15,60	5,40	0,60	5,30	3,60
14.	Poncowarno	15,60	5,40	0,60	5,30	3,60
15.	Kebumen	15,60	2,70	0,60	5,30	3,60
16.	Pejagoan	15,60	5,20	0,60	5,30	3,60
17.	Sruweng	15,60	5,20	0,90	5,30	3,60
18.	Adimulyo	20,00	5,20	0,90	7,05	3,60
19.	Kuwarasan	15,60	2,70	0,90	5,30	3,60
20.	Rowokele	15,60	5,40	0,90	5,30	3,60
21.	Sempor	15,60	5,40	0,90	5,30	3,60
22.	Gombong	15,60	2,70	0,90	5,30	3,60
23.	Karanganyar	15,60	5,40	0,90	5,30	3,50
24.	Karanggayam	15,60	2,70	0,60	5,30	2,30
25.	Sadang	15,60	2,70	0,60	5,30	2,30
26.	Karangsambung	15,60	2,70	0,90	7,05	3,60
	JUMLAH	514,00	126,00	25,00	176,00	117,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 65 TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBUTUHAN PUPUK DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015

No	Kecamatan	JENIS PUPUK				
		Urea (Ton)	SP-36 (Ton)	ZA (Ton)	N P K (Ton)	Organik (Ton)
1.	Ayah	29,65	2,57	1,36	2,80	2,14
2.	Buayan	29,65	2,57	1,36	1,40	2,14
3.	Puring	45,95	2,86	1,36	4,25	2,14
4.	Petanahan	48,95	3,00	1,36	4,25	2,14
5.	Klirong	48,95	2,86	1,36	5,65	2,14
6.	Buluspesantren	48,95	2,86	2,27	5,65	3,55
7.	Ambal	44,50	2,86	2,05	2,80	3,20
8.	Mirit	51,90	3,71	2,27	2,80	3,55
9.	Bonorowo	24,90	2,14	0,68	2,80	1,06
10.	Prembun	21,80	2,10	0,68	2,80	1,06
11.	Padureso	24,90	2,40	0,47	1,40	0,70
12.	Kutowinangun	24,90	2,40	0,68	2,80	1,06
13.	Alian	21,80	2,03	0,68	1,40	1,06
14.	Poncowarno	21,80	2,10	0,68	1,40	1,06
15.	Kebumen	21,80	2,10	0,68	1,40	1,06
16.	Pejagoan	24,00	2,31	0,68	1,40	1,06
17.	Sruweng	21,80	2,10	0,68	1,40	1,06
18.	Adimulyo	31,10	3,00	0,68	1,40	1,06
19.	Kuwarasan	21,80	2,10	0,68	1,40	1,06
20.	Rowokele	21,80	2,10	0,68	1,40	1,06
21.	Sempor	21,80	2,10	0,68	1,40	1,06
22.	Gombong	21,80	2,10	0,68	1,40	1,06
23.	Karanganyar	21,80	2,10	0,68	1,40	1,06
24.	Karanggayam	21,80	2,10	0,47	1,40	0,70
25.	Sadang	21,80	1,86	0,47	1,40	0,70
26.	Karangsambung	31,10	2,57	0,68	1,40	1,06
	JUMLAH	771,00	63,00	25,00	59,00	39,00

BUPATI KEBUMEN

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN VI
 BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 65 TAHUN 2014
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI JENIS UREA UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	ALOKASI	ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER BULAN DALAM SATUAN TON												JUMLAH
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Ayah	500,50	125,00	48,00	11,50	30,00	59,00	59,00	3,00	14,00	10,00	9,00	47,00	85,00	500,50
2	Buayan	684,00	102,00	21,00	17,00	32,00	170,00	43,00	18,00	15,00	15,00	18,00	70,00	163,00	684,00
3	Puring	1.917,00	217,00	206,00	117,00	184,00	380,00	180,00	35,00	76,00	56,00	96,00	220,00	150,00	1.917,00
4	Petanahan	1.464,00	190,00	104,00	58,00	35,00	304,00	130,00	19,00	95,00	38,00	76,00	245,00	170,00	1.464,00
5	Klirong	825,00	152,00	58,00	43,00	25,00	150,00	60,00	12,00	31,00	17,00	22,00	133,00	122,00	825,00
6	Buluspesantren	1.834,00	288,00	103,00	97,00	122,00	278,00	218,00	98,00	111,50	55,00	139,00	146,50	178,00	1.834,00
7	Ambal	1.835,50	354,00	113,00	54,00	108,00	241,50	180,00	73,00	83,50	81,50	71,00	255,00	221,00	1.835,50
8	Mirit	1.750,00	292,00	160,00	84,00	85,00	182,00	225,00	114,00	110,00	53,00	24,00	203,00	218,00	1.750,00
9	Bonorowo	687,00	136,00	69,00	9,00	10,00	64,00	199,00	22,00	46,00	8,00	8,00	26,00	90,00	687,00
10	Prembun	668,00	95,00	56,00	27,00	16,00	73,00	90,00	30,00	24,00	24,00	48,00	86,00	99,00	668,00
11	Padureso	340,00	62,00	10,00	9,00	8,00	44,00	28,00	5,00	5,00	8,00	30,00	73,00	58,00	340,00
12	Kutowinangun	899,00	185,00	63,00	6,00	66,00	117,00	151,00	23,00	24,00	8,00	15,00	131,00	110,00	899,00
13	Alian	894,00	141,00	71,00	44,00	47,00	138,00	60,00	20,00	6,00	16,00	62,00	149,00	140,00	894,00
14	Poncowarno	651,00	169,00	58,00	11,00	44,00	55,00	30,00	11,00	8,00	12,00	44,00	99,00	110,00	651,00
15	Kebumen	1.099,00	175,00	105,00	38,00	83,00	179,00	157,00	33,00	32,00	17,00	35,00	101,00	144,00	1.099,00
16	Pejagoan	447,50	73,00	66,00	13,00	9,00	29,00	33,00	15,00	15,00	10,00	9,00	120,50	55,00	447,50
17	Sruweng	733,50	143,00	63,00	19,00	12,00	150,00	93,00	16,00	20,00	29,00	30,00	73,50	85,00	733,50
18	Adimulyo	1.709,00	286,00	84,00	8,00	189,00	400,00	116,00	60,00	32,00	4,00	32,00	288,00	210,00	1.709,00
19	Kuwarasan	1.033,00	145,50	63,00	8,00	94,50	223,50	71,00	19,00	35,00	32,50	47,00	153,00	141,00	1.033,00
20	Rowokele	934,50	160,00	91,00	71,00	96,00	163,00	30,50	13,00	16,00	16,00	8,00	120,00	150,00	934,50
21	Sempor	758,00	118,00	66,00	37,50	63,00	143,50	37,00	5,00	10,50	8,00	55,00	114,50	100,00	758,00
22	Gombong	884,00	187,00	60,00	19,00	80,00	51,00	10,00	10,00	16,00	16,00	48,00	237,00	150,00	884,00
23	Karanganyar	782,00	139,00	63,00	46,00	64,00	70,00	52,00	17,00	32,00	21,00	62,00	110,00	106,00	782,00
24	Karanggayam	1.103,00	289,00	130,00	134,00	71,00	102,00	32,00	10,00	24,00	24,00	32,00	135,00	120,00	1.103,00
25	Sadang	430,50	47,00	39,00	40,00	60,00	10,00	12,00	10,00	10,00	10,00	30,00	80,00	82,50	430,50
26	Karangsambung	837,00	194,00	86,00	45,00	34,00	113,00	49,00	38,00	30,00	16,00	49,00	105,00	78,00	837,00
		25.700,00	4.464,50	2.056,00	1.066,00	1.667,50	3.889,50	2.345,50	729,00	921,50	605,00	1.099,00	3.521,00	3.335,50	25.700,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN VII
 BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 65 TAHUN 2014
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI JENIS SP-36 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	ALOKASI	ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER BULAN DALAM SATUAN TON												JUMLAH
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Ayah	129,00	13,00	4,00	18,50	15,00	7,00	5,00	5,00	20,00	1,50	5,00	10,00	25,00	129,00
2	Buayan	191,00	13,00	15,00	2,00	19,00	38,00	14,00	2,50	4,00	12,00	7,50	14,00	50,00	191,00
3	Puring	523,00	41,00	44,00	56,50	34,00	45,50	52,50	39,00	17,00	19,50	48,00	59,00	67,00	523,00
4	Petanahan	635,00	110,00	37,50	33,00	60,50	99,00	30,00	13,50	24,00	25,50	30,00	72,00	100,00	635,00
5	Klirong	119,00	8,00	10,00	10,00	10,00	17,00	14,00	6,00	5,00	9,00	2,00	9,00	19,00	119,00
6	Buluspesantren	458,00	38,00	32,50	48,50	40,00	64,50	35,50	11,00	14,00	4,00	29,00	85,00	56,00	458,00
7	Ambal	460,50	29,00	45,00	38,50	31,00	67,00	42,50	20,00	21,50	18,00	45,00	44,00	59,00	460,50
8	Mirit	317,00	26,00	30,00	45,00	8,00	25,00	43,00	10,00	14,00	2,00	21,00	33,00	60,00	317,00
9	Bonorowo	131,50	22,00	8,00	16,00	2,00	9,50	18,00	5,00	6,00	7,00	4,00	9,00	25,00	131,50
10	Prembun	190,00	19,00	20,00	7,00	4,00	15,00	21,00	6,00	12,00	4,00	12,00	30,00	40,00	190,00
11	Padureso	76,00	4,00	4,00	7,00	7,00	7,00	2,00	3,00	5,00	5,00	8,00	10,00	14,00	76,00
12	Kutowinangun	205,00	28,00	8,00	5,00	17,00	22,00	21,00	12,00	15,00	5,00	20,00	22,00	30,00	205,00
13	Alian	238,00	29,00	26,50	8,00	13,00	30,00	10,00	7,00	2,00	16,00	7,00	38,00	51,50	238,00
14	Poncowarno	105,50	4,00	3,00	4,00	2,00	15,00	5,50	8,00	4,00	2,00	18,00	18,00	22,00	105,50
15	Kebumen	382,50	47,00	50,00	31,00	31,00	50,00	20,00	8,00	7,00	7,00	19,00	54,00	58,50	382,50
16	Pejagoan	65,50	10,00	3,00	5,00	5,00	6,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	10,50	12,00	65,50
17	Sruweng	220,50	24,00	6,50	7,50	8,00	41,00	11,00	6,50	4,00	9,00	4,00	27,00	72,00	220,50
18	Adimulyo	293,50	22,00	10,00	12,00	20,00	51,50	40,00	5,50	11,00	2,00	41,00	35,50	43,00	293,50
19	Kuwarasan	220,00	12,00	4,00	12,50	21,00	44,50	19,00	3,00	10,00	17,00	8,00	32,50	36,50	220,00
20	Rowokele	237,00	40,00	13,00	15,00	20,50	41,00	9,00	6,50	13,00	2,00	8,00	13,00	56,00	237,00
21	Sempor	163,00	10,00	10,00	4,00	16,00	43,00	4,00	15,50	10,00	10,00	9,50	12,00	19,00	163,00
22	Gombong	233,50	29,00	10,00	9,00	26,00	36,00	10,50	5,00	3,00	10,00	20,00	32,00	43,00	233,50
23	Karanganyar	197,50	10,00	7,00	15,00	15,00	28,00	16,50	17,00	11,00	10,00	13,00	17,00	38,00	197,50
24	Karanggayam	153,00	18,00	21,00	19,00	1,00	3,00	12,00	7,00	8,00	3,00	11,00	16,00	34,00	153,00
25	Sadang	73,00	8,00	7,00	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	7,00	16,00	73,00
26	Karangsambung	282,50	32,00	41,00	16,00	7,00	14,00	21,00	5,50	8,00	4,00	22,00	53,00	59,00	282,50
		6.300,00	646,00	470,00	452,00	437,00	823,50	483,00	234,50	255,50	211,50	419,00	762,50	1.105,50	6.300,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN VIII
 BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 65 TAHUN 2014
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI JENIS ZA UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	ALOKASI	ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER BULAN DALAM SATUAN TON												JUMLAH
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Ayah	40,00	7,00	3,00	3,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	4,00	5,00	4,00	40,00
2	Buayan	104,50	10,00	5,50	4,00	5,00	11,00	7,00	8,00	1,00	2,00	5,00	11,00	35,00	104,50
3	Puring	499,50	45,00	23,00	41,50	28,50	74,50	47,00	1,00	15,00	22,00	37,00	33,00	132,00	499,50
4	Petanahan	388,50	36,00	11,00	18,50	31,00	22,50	12,50	1,00	20,00	40,50	16,50	43,50	135,50	388,50
5	Klirong	173,50	10,00	7,00	5,00	10,00	11,50	10,00	3,00	6,00	6,00	8,00	8,00	89,00	173,50
6	Buluspesantren	428,00	37,00	12,00	24,00	34,00	39,50	37,00	12,50	56,00	7,00	22,00	50,00	97,00	428,00
7	Ambal	435,00	38,00	4,00	42,00	30,00	56,00	52,00	7,00	52,00	14,00	20,00	40,00	80,00	435,00
8	Mirit	484,00	32,00	20,00	44,00	34,00	46,00	53,00	15,00	36,00	24,00	43,00	67,00	70,00	484,00
9	Bonorowo	236,00	32,00	26,00	19,00	21,00	13,00	2,00	8,00	12,00	32,00	19,00	24,00	28,00	236,00
10	Prembun	258,50	57,00	12,00	20,00	4,00	15,00	10,00	4,00	10,00	17,00	15,50	16,00	78,00	258,50
11	Padureso	50,00	10,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,00	9,00	7,00	50,00
12	Kutowinangun	149,50	10,00	4,00	4,00	6,00	14,50	29,00	5,00	15,00	13,50	21,00	17,00	10,50	149,50
13	Alian	157,00	28,00	17,00	8,00	8,00	14,00	18,00	5,00	2,50	4,00	17,00	11,00	24,50	157,00
14	Poncowarno	75,00	10,00	3,00	5,00	3,00	8,50	10,50	6,00	2,00	2,00	7,00	5,00	13,00	75,00
15	Kebumen	138,50	28,00	8,00	11,00	4,00	15,50	16,00	7,00	6,50	5,00	3,00	8,00	26,50	138,50
16	Pejagoan	81,00	10,00	2,00	10,00	5,00	5,00	3,00	2,00	2,00	7,00	5,00	10,00	20,00	81,00
17	Sruweng	141,50	12,00	1,50	21,00	15,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	1,00	20,00	58,00	141,50
18	Adimulyo	63,00	10,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	2,00	3,00	1,00	2,00	4,00	19,00	63,00
19	Kuwarasan	158,00	51,00	7,50	6,50	3,00	28,00	8,00	6,00	1,00	5,00	7,00	15,00	20,00	158,00
20	Rowokele	184,50	40,00	15,00	3,00	3,00	30,00	13,00	6,00	6,00	6,00	5,00	30,00	27,50	184,50
21	Sempor	100,00	23,00	5,00	5,00	7,50	14,50	5,00	5,00	5,00	2,00	10,00	5,00	13,00	100,00
22	Gombong	302,00	39,00	18,50	20,00	4,00	40,00	10,50	3,00	1,00	16,00	22,00	54,00	74,00	302,00
23	Karanganyar	166,50	10,00	11,00	9,00	2,00	41,50	13,00	4,00	6,00	10,00	2,00	20,00	38,00	166,50
24	Karanggayam	88,00	10,00	5,00	2,00	2,00	4,00	1,00	2,00	4,00	2,00	10,00	7,00	39,00	88,00
25	Sadang	52,00	10,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	3,00	5,00	6,00	52,00
26	Karangsambung	96,00	10,00	8,00	8,00	7,00	3,00	10,00	12,50	12,00	2,00	3,50	8,00	12,00	96,00
		5.050,00	615,00	238,00	344,50	287,00	524,50	382,50	133,00	284,00	250,00	309,50	525,50	1.156,50	5.050,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN IX
BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI JENIS NPK PHONSKA UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	ALOKASI	ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER BULAN DALAM SATUAN TON												JUMLAH
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Ayah	305,50	45,00	7,50	34,00	2,00	29,00	26,00	2,00	71,50	1,50	9,00	12,00	66,00	305,50
2	Buayan	256,00	23,00	11,00	7,00	21,00	47,00	7,00	5,00	4,00	10,00	9,00	42,00	70,00	256,00
3	Puring	973,50	116,00	48,00	96,00	60,00	134,50	52,50	38,50	65,00	55,00	50,00	153,00	105,00	973,50
4	Petanahan	1.201,50	293,00	45,50	68,00	44,00	153,00	45,00	71,00	40,50	65,00	73,00	203,50	100,00	1.201,50
5	Klirong	351,50	21,00	20,00	13,00	21,00	82,50	34,00	13,00	22,00	4,50	9,00	48,00	63,50	351,50
6	Buluspesantren	963,00	134,00	25,00	73,00	75,00	112,50	155,00	42,50	56,00	29,00	58,00	103,00	100,00	963,00
7	Ambal	967,00	134,00	52,00	161,00	36,00	73,50	125,00	36,50	64,50	48,00	52,00	84,50	100,00	967,00
8	Mirit	932,50	102,00	58,00	89,00	66,00	82,50	114,50	49,00	55,00	46,00	59,00	95,50	116,00	932,50
9	Bonorowo	288,50	81,00	27,00	6,00	2,00	16,50	20,00	3,00	5,00	13,00	11,00	9,00	95,00	288,50
10	Prembun	297,00	86,00	16,00	10,00	4,00	26,50	27,00	22,50	12,00	10,00	10,00	8,00	65,00	297,00
11	Padureso	132,00	8,00	10,00	10,00	10,00	3,00	10,00	8,00	4,00	5,00	10,00	9,00	45,00	132,00
12	Kutowinangun	280,00	67,00	8,00	11,00	13,00	34,00	10,50	10,00	34,00	2,50	7,00	29,00	54,00	280,00
13	Alian	401,00	100,00	30,00	9,00	8,00	42,00	50,00	13,00	4,00	16,00	20,50	26,00	82,50	401,00
14	Poncowarno	157,00	26,00	5,00	10,00	10,00	8,00	9,00	3,00	2,00	5,00	8,00	21,00	50,00	157,00
15	Kebumen	542,00	165,00	28,00	18,00	29,00	52,50	55,50	10,00	3,00	14,00	17,00	75,00	75,00	542,00
16	Pejagoan	137,50	22,00	5,00	10,00	10,00	26,00	6,00	8,00	2,00	5,00	5,00	8,50	30,00	137,50
17	Sruweng	375,00	53,00	13,50	10,00	10,00	46,00	18,50	10,00	15,00	9,00	12,00	37,00	141,00	375,00
18	Adimulyo	433,50	53,50	8,00	10,00	26,00	75,50	54,00	5,50	9,00	5,00	30,00	75,00	82,00	433,50
19	Kuwarasan	397,50	52,50	20,00	12,00	22,00	55,00	25,00	15,00	10,00	62,00	18,00	26,50	79,50	397,50
20	Rowokele	438,50	109,00	26,50	16,50	24,00	57,50	25,50	17,50	18,00	5,00	20,00	53,00	66,00	438,50
21	Sempor	360,00	30,00	9,00	9,00	60,00	64,00	5,00	15,00	5,00	5,00	11,00	75,00	72,00	360,00
22	Gombong	500,50	101,50	35,00	38,00	34,00	40,50	17,50	5,00	7,00	13,00	37,00	92,50	79,50	500,50
23	Karanganyar	380,00	62,50	30,00	22,00	17,00	57,00	14,00	19,50	20,00	6,00	24,00	53,00	55,00	380,00
24	Karanggayam	259,50	51,50	45,00	14,00	3,00	10,00	7,00	10,00	9,00	5,00	22,00	12,00	71,00	259,50
25	Sadang	165,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	60,00	165,00
26	Karangsambung	205,00	30,00	18,00	16,00	10,00	3,00	10,00	8,00	13,00	8,00	16,50	35,00	37,00	205,00
		11.700,00	1.976,50	611,00	782,50	627,00	1.351,50	933,50	445,50	555,50	452,50	608,00	1.396,00	1.960,00	11.700,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN X
 BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 65 TAHUN 2014
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI JENIS ORGANIK PETROGANIK UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	ALOKASI	ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER BULAN DALAM SATUAN TON												JUMLAH
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Ayah	163,00	6,00	10,00	27,00	16,00	20,00	4,00	4,00	4,00	6,00	10,00	8,00	48,00	163,00
2	Buayan	177,00	4,00	8,00	9,00	18,00	41,00	5,00	8,00	3,00	2,00	5,00	30,00	44,00	177,00
3	Puring	733,00	92,00	87,00	62,00	8,00	96,00	65,00	52,00	39,00	37,00	57,00	74,00	64,00	733,00
4	Petanahan	694,00	16,00	28,00	26,00	121,00	161,00	37,00	19,00	18,00	9,00	29,00	76,00	154,00	694,00
5	Klirong	251,00	10,00	4,00	34,00	50,00	43,00	9,00	2,00	6,00	6,00	10,00	23,00	54,00	251,00
6	Buluspesantren	600,00	53,00	17,00	53,00	81,00	55,00	66,00	19,00	23,00	16,00	38,00	71,00	108,00	600,00
7	Ambal	456,00	60,00	11,00	80,00	56,00	21,00	42,00	24,00	20,00	24,00	21,00	33,00	64,00	456,00
8	Mirit	572,00	50,00	18,00	69,00	68,00	39,00	77,00	21,00	14,00	28,00	41,00	56,00	91,00	572,00
9	Bonorowo	198,00	19,00	16,00	15,00	36,00	19,00	10,00	11,00	10,00	5,00	10,00	10,00	37,00	198,00
10	Prembun	251,00	20,00	7,00	8,00	20,00	16,00	49,00	16,00	8,00	4,00	30,00	13,00	60,00	251,00
11	Padureso	135,00	12,00	12,00	10,00	16,00	3,00	2,00	3,00	5,00	5,00	9,00	5,00	53,00	135,00
12	Kutowinangun	251,00	15,00	19,00	10,00	40,00	40,00	10,00	4,00	7,00	7,00	16,00	9,00	74,00	251,00
13	Alian	302,00	36,00	10,00	8,00	77,00	43,00	24,00	6,00	6,00	4,00	26,00	19,00	43,00	302,00
14	Poncowarno	118,00	17,00	10,00	4,00	10,00	11,00	7,00	7,00	4,00	4,00	8,00	14,00	22,00	118,00
15	Kebumen	330,00	31,00	8,00	13,00	66,00	59,00	4,00	9,00	3,00	14,00	10,00	23,00	90,00	330,00
16	Pejagoan	142,00	10,00	8,00	3,00	34,00	15,00	7,00	3,00	2,00	5,00	10,00	12,00	33,00	142,00
17	Sruweng	300,00	9,00	1,00	20,00	35,00	58,00	13,00	4,00	4,00	9,00	3,00	44,00	100,00	300,00
18	Adimulyo	295,00	19,00	4,00	30,00	26,00	70,00	5,00	6,00	5,00	5,00	22,00	63,00	40,00	295,00
19	Kuwarasan	192,00	31,00	9,00	8,00	34,00	30,00	4,00	9,00	4,00	6,00	15,00	2,00	40,00	192,00
20	Rowokele	256,00	22,00	9,00	11,00	18,00	50,00	4,00	10,00	3,00	10,00	30,00	34,00	55,00	256,00
21	Sempor	275,00	14,00	38,00	18,00	51,00	10,00	3,00	10,00	10,00	4,00	4,00	72,00	41,00	275,00
22	Gombong	331,00	8,00	18,00	28,00	20,00	36,00	4,00	10,00	4,00	24,00	51,00	61,00	67,00	331,00
23	Karanganyar	255,00	15,00	23,00	15,00	9,00	63,00	10,00	12,00	8,00	15,00	10,00	12,00	63,00	255,00
24	Karanggayam	223,00	20,00	36,00	25,00	6,00	11,00	6,00	10,00	11,00	2,00	5,00	38,00	53,00	223,00
25	Sadang	150,00	10,00	10,00	5,00	10,00	24,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	20,00	41,00	150,00
26	Karangsambung	150,00	17,00	24,00	8,00	30,00	8,00	10,00	6,00	5,00	4,00	6,00	10,00	22,00	150,00
		7.800,00	616,00	445,00	599,00	956,00	1.042,00	482,00	290,00	231,00	260,00	486,00	832,00	1.561,00	7.800,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO